LAPORAN PELAYANAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

@
@@@
@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@
@@@
@

TRIWULAN III

@
@@@
@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@
@@@
@

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN
JL. GATOT SUBROTO NO.2 KEDIRI - TABANAN
TLP.(0361) 811171
2024

KATA PENGANTAR

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami bersyukur dapat menyusun Laporan Pelayanan Adminitrasi Pemerintahan Triwulan III Tahun 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Penyajian laporan ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam kerangka *good governance* seperti yang tertuang dalam Undang Undang Nonmor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Aturan tersebut mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penangangan pengaduan secara transfaran dan akuntabel.

Rampungnya laporan ini tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras aparatur BPBD. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan data dan informasi sehingga pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dapat diselesaikan sesuai peraturan dan mekanisme yang ada.

Untuk peningkatan kualitas laporan ini, dimohon masukan dan sarannya agar lebih meningkatnya kinerja Badan Penanggulangan Bencana dalam pelayanan administrasi pemerintahan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah dan tujuan strategis organisasi.

Tabanan, 1 Oktober 2024
Kepala Pelaksana
Badan Peanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan

I Nyoman Srinadha Giri, S.E
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI..... ii
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Dasar Hukum 2
1.3 Tujuan 3
BAB II RENCANA PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN..... 4
2.1 Sumber Daya Manusia..... 4
2.2 Pengukuran Indikator Pelayanan Administrasi Pemerintahan..... 4
BAB III EVALUASI PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 6
3.1 Evaluasi Capaian Indikator Administrasi Pemerintahan 6
3.2 Evaluasi Layanan Administrasi Pemerintahan 7
3.2 Kendala dan Rencana Tindak Lanjut..... 9
BAB IV PENUTUP..... 10
4.1 Kesimpulan 10
4.2 Saran 10
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 mengamanhkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan administrasi pemerintahan yang memberikan dampak luas kepada masyarakat. Pasal 1 menjelaskan administrasi secara luas mempunyai arti sebagai suatu kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang dan/organisasi berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dengan struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Lebih lanjut pada Pasal 2 dijelaskan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Pada Pasal 5 dijelaskan penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan : 1). Asas legalitas, 2). Asas pelindungan terhadap hak asasi manusia, dan 3). Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Administrasi dapat dilihat dalam pengertian sempit dan luas. Administrasi secara sempit didefinisikan sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara otomatis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh. Pengertian administrasi secara sempit lebih tepatnya disebut tata usaha. administrasi secara luas mempunyai arti sebagai suatu kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang dan/organisasi berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dengan struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien

Pemerintah berkewajiban membentuk sistem administrasi dan birokrasi mulai dari pemerintahan yang paling tinggi sampai ke tingkat pemerintahan yang terendah. Diharapkan pelayanan ditujukan menghasilkan pelayanan prima yang merupakan komitmen organisasional birokrasi pemerintah, komitmen organisasi bermakna berpihaknya birokrasi pemerintah berada pada pihak masyarakat. Melayani berarti membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan masyarakat dikaitkan dengan pelayanan prima adalah pelayanan yang memiliki kualitas unggul.

Pelayanan yang memuaskan mengandung lima unsur yaitu: 1). Pelayanan merata dan sama, 2). Pelayanan yang diberikan tepat pada waktunya, 3). Pelayanan

yang diberikan memenuhi jumlah dan jasa, 4). Pelayanan harus merupakan pelayanan yang berkasinambungan, 5). Pelayanan merupakan pelayan yang dapat meningkatkan kualitas dari pelayanan.

Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berupaya melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan agar semuanya dapat memenuhi harapan pemerintah pusat maupun daerah untuk menjadikan masyarakat tanggap, siaga, dan tangguh dalam menghadapi risiko bencana.

Untuk mengukur keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan menuju *good governance* maka dilakukan evaluasi atas kinerja perangkat daerah secara berkala dan berjenjang.

1.2. Landasan Hukum.

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
6. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
7. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan

1.3. Tujuan.

1. Memberikan gambaran kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.
2. Memberikan informasi kinerja pelayanan administrasi pemerintahan urusan wajib dasar kebencanaan dalam upaya mendukung misi pertama RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman).

II. RENCANA PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

2.1 Sumber Daya Aparatur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan urusan wajib dasar di sub urusan kebencanaan didukung oleh sumber daya aparatur :

a. Sumber daya PNS sebanyak 14 orang yang terdiri atas 1 orang Kepala Pelaksana, 1 orang Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala Sub Bagian, 9 orang Fungsional Umum dan 0 orang Fungsional Tertentu, 12 tenaga non ASN administrasi, dan 35 orang Non ASN Tim Rekasi Cepat.

b. ASN yang telah memiliki sertifikat teknis kebencanaan sebanyak 6 orang

c. ASN yang telah memiliki sertifikat perencanaan penanggulangan bencana sebanyak 2 orang.

d. TRC yang telah memiliki sertifikat teknis tanggap bencana sebanyak 35 orang

2.2 Pengukuran Indikator Pelayanan Administrasi Pemerintahan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkolaborasi dalam pencapaian indikator pelayanan administrasi pemerintahan. Adapun target kinerjanya tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja tahun 2024 berikut ini.

a. Indikator Kinerja Tujuan

Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Meningkatnya kwalitas tata kelola pemerintah daerah	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan OPD	Hasil evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Nilai delapan area perubahan reformasi birokrasi perangkat daerah	85

Sumber : PK, 2024

b. IKU BPBD seperti berikut ini.

Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan OPD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai LKjIP	Nilai laporan kinerja BPBD yang direviu oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan	A (81)

Sumber : PK, 2024

c. IKP BPBD seperti berikut ini

Progam	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	Realisasi anggaran dalam mendunjang pelayanan setiap triwulan dibagi target anggaran triwulan dikalikan 100	100%

Sumber : PK, 2024

d. IKK seperti berikut ini

Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Perencanan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, dokumen evaluasi kinerja BPBD yang disahkan pimpinan perangkat daerah	3 dokumen
Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	Realisasi anggaran belanja BPBD dibandingkan dengan pagu anggaran yang tertuang dalam DPA	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum BPBD	Realisasi administrasi umum rumah tangga BPBD dibandingkan dengan pagu anggaran yang tertuang dalam DPA	100%
Pengadaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD	Realisasi BMD yang diadakan dibandingkan dengan pagu anggaran yang tertuang dalam DPA	100%
Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjnag urusan kantor	Realisasi jasa penunjnag urusan kantor BPBD dibandingkan dengan pagu anggaran yang tertuang dalam DPA	100%
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor	Realisasi pemeliharaan barang milik daerah dibandingkan dengan pagu anggaran yang tertuang dalam DPA	100%

Sumber : DPA, 2024

III. EVALUASI PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

3.1 Evaluasi Indikator Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara berkala mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian indikator pelayanan administrasi pemerinathan. Adapun hasil evaluasi periode Januari sd Oktober 2024 disajikan berikut ini.

a. Capaian indikator kinerja tujuan.

Tujuan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Evaluasi
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan OPD	Hasil evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	85	81,21	BPBD terus menerus menyempurnakan pemenuhan indikator penilaian mandiri reformasi birokrasi agar sesuai dengan amanah peraturan yang berlaku

Sumber : Data diolah, 2024

b. Capaian Indikator kinerja utama.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Evaluasi
Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai LKjIP	81 (A)	71,41 (BB)	BPBD terus menerus menyempurnaan pemenuhan intsrumen SAKIP sessuai rekomendasi Tim Inspektorat

Sumber : Data diolah, 2024

c. Capaian Indikator kinerja program

Progam	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Evaluasi
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	75%	Pelayanan administrasi kepada pegawai sudah dapat terpenuhi sesuai skala prioritas

Sumber : Data diolah, 2024

c. Capaian indikator kinerja kegiatan

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Evaluasi
Perencanan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 dokumen	2 dok	Pelayanan penyediaan dokumen SAKIP sudah dapat disediakan dan disampaikan kepada pihak terkait : Renja, LKjIP

Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%	74,21%	Pelayanan administrasi keuangan kekurangan anggaran dalam RAK karena adanya kenaikan gaji, tunjangan, dan tunjangan khusus dan dipertanggungajwabkan dalam laporan keuangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum BPBD	100%	70,51%	Pelayanan administrasi umum rumah tangga BPBD sudah dapat terenuhi sesuai skala prioritas
Pengadaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD	0%	0%	Pelayanan pengadaan BMD tidak mendapatkan anggaran
Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjnag urusan kantor	100%	72,31%	Pelayanan jasa bagi tenaga non ASN sudah dapat terpenuhi
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor	100%	67,71%	Pelayanan pemeliharaan kendaraan dinas sudah dapat terpenuhi sesuai skala priorotas untuk menunjang operasional

Sumber : Data diolah, 2024

3.2 Evaluasi Pelayanan Administrasi Pemerintahan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan telah berupaya memenuhi ketantuan perundang-undangan agar aparatur memberikan layanan administrasi pemerintahan dalam kerangka *good governance*. Hasil evaluasi periode Januari sd September 2024 sebagai berikut :

a. Administrasi perencanaan

- Administrasi perencanaan kinerja sudah dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan internal perencanaan perangkat daerah dan memenuhi permintaan dokumen dari pihak eksternal.
- Adapun dokumen perencanaan kinerja yang sudah dihasilkan dan bisa diakses oleh umum antara lain : Renja Induk 2024, Forum OPD, KAK, RUP, RKA, DPA induk dan pergeseran 2024, Ranhir Renja 2025, dan Renja Perubahan 2024
- Adapun dokumen pengukuran kinerja yang sudah dihasilkan dan bisa diakses oleh umum antara lain : cascading, perjanjian kinerja

- Adapun dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja yang sudah dihasilkan dan bisa diakses oleh umum antara lain : Evaluasi program triwulanan, LPPD 2023, LKPJ 2023, LKjIP 2023.

b. Administrasi keuangan

- Administrasi keuangan masih di bawah RAK realisasi sesuai dengan kebutuhan internal pertanggungajwaban keuangan perangkat daerah serta memenuhi permintaan dokumen dari pihak eksternal.
- Adapun dokumen pertanggungajwaban keuangan yang sudah dihasilkan dan bisa diakses oleh umum antara lain : LKPD 2023, CaLK 2023, DTH, LRA bulanan, SPJF bulanan, laporan realisasi P3DN, laporan realisasi LPSE.
- Adapun dokumen pertanggungajwaban aset yang sudah dihasilkan dan bisa diakses oleh umum antara lain : KIR, KIB, laporan persediaan, laporoan aset 2023 yang audited terbit 2024

c. Administrasi umum

- Administrasi umum dan rumah tangga BPBD telah dapat dipenuhi untuk mendukung kelancaran operasional kantor dan pelayanan publik.
- Peralatan rumah tangga kantor yang sudah dapat disediakan antara lain penyediaan komponen instanlasi listrik untuk penerangan kantor, peralatan rumah tangga kantor, logistik banten.
- Pemenuhan layanan penggandaan dokumen melalui foto copy, pencetakan, dan tinta untuk kelancaran administrasi (ada *223* surat masuk dan *226* surat keluar)
- Rapat-rapat koordiansi ke provinsi dan pusat untuk kelancaran sinkronisasi program penanggulangan bencana belum terlaksana

d. Administrasi pengadaan barang

- Peralatan kerja yang ada masih terbatas dan sudah banyak rusak ringan, sehingga memerlukan biaya pemeliharaan agar dapat mendukung kelancaran pelayanan administrasi. TA 2024 tidak ada anggaran pengadaan BMD

e. Administrasi pemeliharaan barang

- Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat sudah terlaksana baik servis, ganti suku cadang, dan samsat.
- Pemeliharaan kendaraan roda dua masih lagi 1 (satu) kendaran dinas yang belum mendapat anggaran samsat sehingga diambil kebijakan pemeliharaan, servis, dan samsat ditanggung oleh pemegang kendaraan masing-masing

f. Administrasi jasa penunjang kantor

- Pelayanan jasa non ASN telah dapat dilayani selama 9 bulan sesuai anggaran yang tertuang pada DPA.

- Non ASN sudah dapat memberikan jasa layanan sesuai penugasan di Sekretariat dan Bidang Teknis sehingga pelayanan kebencanaan dapat berjalan dengan baik
- Pelayanan administrasi ASN secara reguler antara lain : pemutahiran DUK, DSP, Sat Kerthi, e-kinerja BKN, mayasn BKN
- Pelayanan administrasi ASN sesuai permohonan intansi terkait : pemutahiran data SIASN, pemutahiran formasi jabatan fungsional dan pelaksana, pemutahiran peta jabatan, pemutahiran ABK dan ANJAB, dan pemutahiranekinerja BKN
- Pelayanan peningkatan IPM aparatur dengan mengimput sertifikat pelatihan, bimtek, diklat, semnar, sosialsiasi, dan webinar terkait.

3.3 Kendala dan Rencana Tindak Lanjut

Pelayanan administrasi urusan wajib dasar di sub urusan bencana yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan sudah diupayakan sesuai stándar pelayanan, namun masih diketemukan kendala sehingga telah dirancang rencana tindak lanjutnya seperti tabel berikut ini.

No	Layanan	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
1	Perencanaan kebencanaan	Usulan masyarakat tidak banyak masuk e-musren	Melakukan pohir, kajian partisipatif dan kajian teknokratik dengan mengkooordiansikan anggaran bencana dengan TAPD
		Usulan peralatan kebencanaan belum masuk PPAS	Mengusulkan sarana kebencanaan melalui proposal BKK APBD Provinsi
2	Administrasi keuangan	Perubahan aturan keuangan	Aktif berkoordiansi dengan Bakeuda, BPBD Provinsi, dan BNPB
3	Administrasi umum	Perlengkapan rumah tangga yang minim	Mengoptimalkan peralatan rumah tangga BPBD dan piket pegawai
4	Jasa penunjang kantor	Internet sering tidak lancar	Berkoordinasi dengan Dinas Kominfo dan telkom
		Kajian perencanaan kebutuhan P3K bagi operator layanan operasional	Mengusulkan peta jabatan dan ABK dengan kelas jabatan 5
5	Pemeliharaan barang milik daerah	Kerusakan AC, kendaraan operasional, komputer, laptop, printer, mesin darurat bencana	Kendaraan roda dua diserahkan pemeliharaan, servis, kepada pegawai yang menggunaknnya. Servis ringan peralatan kerja kedaruratan diupayakan bengkel mandiri
		Kurangnya anggaran oli kendaraan operaisonal	Mengusulkan melalui RKA-Perubahan 2024

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah merumuskan perencanaan pelayanan administrasi pemerintahan untuk menunjang reformasi birokrasi dan layanan kebencanaan sesuai SPM sub bencana.
b. Capaian kinerja pelayanan administrasi pemerintahan sudah diupayakan optimal sesusi skala prioritas di layanan perencanaan kebencanaan, administrasi keuangan, administarsi umum, jasa layanan kantor, dan pemeliharaan barang milik daerah.
c. Kinerja layanan administarsi pemerintahan sub urusan bencana telah mendukung pencapaian kinerja tujuan, sasaran, kebijakan dan program pembangunan daerah yang tertuang dalam asta program pembangunan
d. Tata kelola naskah di BPBD sudah disesuikan dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas.

5.2 Saran

Dari uraian tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

a. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan administrasi pemerintahan pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu dilakukan penguatan SDM aparatur dalam memberikan layanan melalui diklat PKA, bimtek/pelatihan, kurus, workshop, dan seminar.
b. Untuk mengatasi permasalahan yang masih sulit dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai *stakeholder* / pentahelik sehingga pelayanan administrasi pemerintahan sesuai amanah reformasi birokrasi yang berakhlak.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan

I Nyoman Srinadha Giri, S.E
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

Lampiran

DATA PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

TRIWULAN I-II

Bulan	Layanan Administrasi Pemerintahan					Ket
	Perencanaan	Keuangan	Umum	Layanan kepegawaian	Layanan BMD	
I	DPA induk Reenja induk	Gaji ASN dan Non PNS, TPP, LRA	Surat,Humas, medsos, pelayanan	DUK, DSP, SKP, SIASN	Pemutahiran KIB	
II	RKA pergeseran	Gaji ASN dan Non PNS, TPP, LRA	Surat,Humas, medsos, pelayanan	Struktur organisasi, mutasi	Pemutahiran KIB	
III	Forum OPD Kajian teknokratik	Gaji ASN dan Non PNS, TPP, LRA	Surat,Humas, medsos, pelayanan	Berkala 1 pegawai	Pengusulan RKBU	
IV	Rancangan Renja Akhir 2025	Gaji ASN dan Non PNS, TPP, LRA	Surat,Humas, medsos, pelayanan	Ekinerja BKN, berkala	Pemutahiran KIR	
V	Eproposal APBN	Gaji ASN dan Non PNS, TPP, LRA	Surat,Humas, medsos, pelayanan	Revisi ANJAB dan ABK	Pemutahiran eBMD	
VI	Rancangan Perubahan Renja 2024	Gaji ASN dan Non PNS, TPP, LRA	Surat,Humas, medsos, pelayanan	Revisi Peta jabatan	Stock ofname persediaan	
VII	Pembahasan PPAS Perubahan	Gaji ASN dan Non PNS, TPP, LRA	Surat,Humas, medsos, pelayanan	Revisi formasi	Pemutahiran KIR	
VIII	Ranperda Perubahan	Gaji ASN dan Non PNS, TPP, LRA	Surat,Humas, medsos, pelayanan	Naik pangkat 2 orang	Penyusunan RPBMD	
IX	Input RKA perubahan	Gaji ASN dan Non PNS, TPP, LRA	Surat,Humas, medsos, pelayanan	Sosialsiasi sistem kerja	Mutasi BMD	

Sekretaris BPBD

Agung Raka Bhakta Wirawan,S.Pi,MMA.

NIP. 19760608 200212 1 009

Lampiran 2

DATA PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

TRIWULAN I sd III

Bulan	Layanan Administrasi Pemerintahan					Ket
	Surat masuk	Surat keluar	SPJ	SPM/SP2D	Laporan	
I	85	189	4	4	16	Dok
II	54	69	14	14	3	Dok
III	84	95	33	33	3	Dok
IV	66	73	21	21	14	Dok
V	97	93	25	25	2	Dok
VI	60	60	13	13	3	Dok
VII	86	86	13	13	14	Dok
VIII	64	64	12	12	3	Dok
IX	42	42	20	20	3	Dok

Sekretaris BPBD

Agung Raka Bhakta Wirawan,S.Pi,MMA.
NIP. 19760608 200212 1 009